

Riwayat dan Peran Van Mook

(Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 40-an) di Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Catatan:
Jabatan formal Van Mook
adalah Letnan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda.



1. PROFIL SINGKAT



Nama:
Hubertus Johannes
van Mook



Lahir:
Semarang,
30 Mei 1894



Wafat:
Prancis,
10 Mei 1965



Asal:
Administrator
kolonial Belanda



Pendidikan:
Indologi,
Universitas Leiden



Jabatan utama:
Letnan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda
(1944–1948)



2. GAGASAN UTAMA



Federalisme Indonesia



Uni Indonesia–Belanda



Otonomi bertahap,
bukan kemerdekaan
penuh langsung



Diplomasi + administrasi
sipil + kekuatan militer



Menjadikan Republik
hanya salah satu bagian
dari negara federal

3. LINIMASA VAN MOOK

1894

Lahir di
Semarang



1931–
1934

Anggota
Volksraad



1942

Hindia Belanda
jatuh ke Jepang;
pemerintahan
pengasingan



1945

Kembali melalui
NICA pasca
Proklamasi



1946

Perundingan
Linggadjati;
Konferensi Malino



1947

Agresi Militer
Belanda I



1948

Renville dan
Garis Van Mook;
mundur dari
jabatan



4. PERAN DI INDONESIA



1 Memimpin upaya kembalinya administrasi Belanda



2 Mendorong pembentukan negara federal



3 Menjadi tokoh penting diplomasi Belanda–Republik



4 Terlibat dalam pembentukan Negara Indonesia Timur



5 Mendukung tindakan militer saat negosiasi gagal

5. ISTILAH KUNCI



NICA
Netherlands Indies
Civil Administration,
administrasi Belanda
pasca Jepang.



Linggadjati
Perjanjian antara Belanda
dan Republik Indonesia,
15 November 1946.



Malino
Konferensi di Malino
(1946) sesudah perundingan
Linggadjati.



Negara Indonesia Timur
Negara federal bentukan
Belanda (1946) dari wilayah
Indonesia bagian timur.



Renville
Perjanjian Renville
(17 Januari 1948)
setelah Agresi Militer I.



Garis Van Mook
Batas demarkasi yang
ditetapkan Van Mook
pasca Perjanjian Renville.



Republik Indonesia Serikat
Negara federal yang dibentuk Belanda (27 Desember 1949)
sebagai bagian dari kedaulatan bertahap.

6. WARISAN & KONTROVERSI

Dari perspektif Belanda moderat

- ✓ Dianggap lebih realistis dibanding kolonialis konservatif
- ✓ Menyadari kolonialisme lama sulit dipulihkan
- ✓ Mendorong transisi politik bertahap



Dari perspektif Republik Indonesia

- ✗ Dipandang sebagai arsitek federalisme kolonial
- ✗ Dianggap memecah kekuatan Republik
- ✗ Terkait NICA, agresi militer, dan Garis Van Mook

Van Mook adalah figur ambivalen: memahami datangnya kemerdekaan,
tetapi gagal menerima Republik Indonesia sebagai pusat kedaulatan penuh.



Kolonialisme Akhir



Federalisme



Diplomasi



Dekolonisasi

*Rudy C Tarumingkeng: Riwayat dan Peran Van Mook (Gubernur
Jenderal Hindia Belanda tahun 40-an) di Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 Juni 2026

RIWAYAT DAN PERAN VAN MOOK (GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA TAHUN 40-AN) DI INDONESIA

Abstrak

Hubertus Johannes "Huib" van Mook merupakan salah satu tokoh paling penting, sekaligus paling kontroversial, dalam fase akhir kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Ia sering disebut sebagai "Gubernur Jenderal Hindia Belanda" pada tahun 1940-an, meskipun secara formal jabatan yang dipegangnya adalah **Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda**. Lahir di Semarang pada 30 Mei 1894 dan wafat di Prancis pada 10 Mei 1965, Van Mook adalah administrator kolonial yang dibentuk oleh tradisi *Politik Etis*, pendidikan indologi Leiden, pengalaman birokrasi Hindia Belanda, dan keyakinan bahwa Hindia Belanda perlu diarahkan menuju bentuk otonomi yang tetap terikat pada Kerajaan Belanda. Dalam masa pendudukan Jepang, ia menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan, terutama melalui basis Australia dan kemudian London. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Van Mook menjadi tokoh utama dalam upaya Belanda menata kembali kekuasaan di Indonesia melalui kombinasi diplomasi, administrasi sipil, pembentukan negara federal, dan tindakan militer. Ia berperan dalam konteks NICA, Perundingan Linggadjati, Konferensi Malino, pembentukan Negara Indonesia Timur, Perjanjian Renville, Garis Van Mook, serta kebijakan yang berujung pada Agresi Militer Belanda I. Artikel ini menelaah riwayat hidup, gagasan politik, peran administratif, strategi federalisme, dilema moral, dan

warisan historis Van Mook di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa Van Mook bukan sekadar simbol kolonialisme reaksioner, tetapi juga bukan tokoh dekolonisasi progresif sebagaimana ia kadang digambarkan dalam sebagian historiografi Belanda. Ia adalah figur ambivalen: memahami bahwa kolonialisme lama tidak dapat dipulihkan, namun tetap ingin mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan strategis Belanda melalui bentuk federal dan Uni Indonesia–Belanda. Dari perspektif Indonesia, kebijakan Van Mook dipahami sebagai strategi memecah kekuatan Republik dan memperpanjang kolonialisme dalam bentuk baru. Dari perspektif Belanda moderat, ia dianggap terlalu maju oleh kelompok konservatif, tetapi dari perspektif nasionalis Indonesia, ia tetap menjadi arsitek utama rekonstruksi kekuasaan kolonial pasca-1945. Warisan Van Mook terletak pada ambiguitas itulah: ia memahami datangnya zaman kemerdekaan, tetapi gagal sepenuhnya menerima kedaulatan Republik Indonesia sebagai fakta politik yang tidak dapat dibalik.

Kata kunci: Van Mook, Hindia Belanda, Revolusi Nasional Indonesia, NICA, federalisme, Linggadjati, Malino, Renville, Garis Van Mook, dekolonisasi, Negara Indonesia Timur.

1. Pendahuluan

Hubertus Johannes van Mook adalah tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Namanya muncul dalam hampir semua peristiwa besar pasca-Proklamasi: kembalinya pemerintahan sipil Belanda, konflik antara Republik Indonesia dan Belanda, diplomasi Linggadjati, proyek federalisme, pembentukan negara-negara bagian, Agresi Militer Belanda I, Perjanjian Renville, dan Garis Van Mook. Ia adalah pejabat tertinggi Belanda di Hindia Belanda setelah Perang Dunia II dan menjadi representasi utama dari kehendak Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia.

Namun, membaca Van Mook tidak sederhana. Dalam ingatan nasional Indonesia, ia sering ditempatkan sebagai simbol kolonialisme Belanda yang berusaha “membelah” Republik melalui federalisme. Dalam sebagian historiografi Belanda, ia kadang digambarkan sebagai administrator liberal yang memahami perlunya perubahan, berbeda dari kelompok kolonial konservatif yang ingin kembali ke Hindia Belanda sebelum perang. Dua gambaran ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya lengkap.

Secara formal, Van Mook bukan Gubernur Jenderal penuh dalam pengertian klasik seperti para pejabat kolonial sebelum 1942.

Parlement.com mencatat bahwa ia memegang fungsi sebagai **Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië** dan menteri dalam periode 1941–1948; ia juga pernah menjadi anggota Volksraad, pejabat ekonomi di Buitenzorg, Direktur Departemen Urusan Ekonomi, Menteri Koloni, dan setelah 1945 menjadi pejabat tertinggi Belanda di Hindia Belanda.

([Parlement](#))

Karena itulah artikel ini memakai istilah “Gubernur Jenderal” dalam tanda konseptual, sesuai penyebutan populer di Indonesia, tetapi menegaskan bahwa jabatan formalnya adalah **Letnan Gubernur Jenderal**. Pembedaan ini penting karena memperlihatkan status transisional Van Mook: ia memimpin dalam masa runtuhnya tatanan kolonial lama, bukan dalam masa stabil Hindia Belanda klasik.

Pertanyaan utama artikel ini adalah: siapakah Van Mook, bagaimana perjalanan hidup dan kariernya, apa gagasan politiknya tentang masa depan Indonesia, bagaimana ia berperan dalam diplomasi dan konflik 1945–1948, dan mengapa perannya tetap kontroversial dalam historiografi Indonesia?

2. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, dan Pembentukan Karakter Kolonial

Hubertus Johannes van Mook lahir di Semarang, Hindia Belanda, pada 30 Mei 1894. Fakta kelahirannya di tanah Hindia penting karena Van Mook bukan sekadar pejabat Belanda yang datang dari Eropa untuk bertugas sementara di koloni. Ia adalah bagian dari generasi administrator kolonial yang memiliki hubungan emosional dan sosial dengan Hindia Belanda. Parlement.com mencatat nama lengkapnya sebagai Hubertus Johannes van Mook, lahir di Semarang pada 30 Mei 1894. ([Parlement](#))

Lingkungan Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sedang berada dalam perubahan. Politik Etis, yang secara resmi berkembang setelah pidato Ratu Wilhelmina tahun 1901, memperkenalkan gagasan bahwa Belanda memiliki "utang kehormatan" kepada penduduk pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Dalam praktiknya, Politik Etis tetap kolonial, tetapi membuka ruang bagi munculnya elite pribumi terdidik dan juga administrator Belanda yang lebih peka terhadap perubahan sosial.

Van Mook dibentuk oleh suasana tersebut. Ia bukan tipe kolonialis konservatif yang hanya melihat Hindia sebagai sumber eksploitasi ekonomi. Ia termasuk kalangan yang percaya bahwa Hindia harus diberi otonomi bertahap. Namun, keyakinan itu tidak sama dengan menerima kemerdekaan penuh Indonesia. Inilah paradoks awal Van Mook: ia dapat berbicara tentang perubahan, kemajuan, dan otonomi, tetapi tetap memandang Belanda sebagai penentu bentuk dan tempo perubahan itu.

Dalam pendidikan, Van Mook menempuh studi indologi di Universitas Leiden. Indologi pada masa itu bukan sekadar studi akademik tentang Indonesia, tetapi juga jalur pembentukan pejabat kolonial. Melalui studi ini, calon administrator mempelajari bahasa, hukum adat, ekonomi kolonial, sejarah, etnografi, dan tata pemerintahan Hindia. Mereka dilatih untuk memahami masyarakat setempat, tetapi dalam kerangka mempertahankan pemerintahan kolonial.

Di sinilah terbentuk gaya Van Mook: ia adalah birokrat intelektual. Ia bukan hanya pelaksana administratif, melainkan pemikir kebijakan. Ia menulis, merancang skema politik, dan memikirkan bentuk negara. Kelak, ketika Republik Indonesia muncul, Van Mook tidak hanya merespons dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan rancangan konstitusional: negara federal, Uni Indonesia–Belanda, dan hubungan ekonomi-politik pascakolonial.

3. Karier Awal dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Karier Van Mook berlangsung dalam struktur birokrasi kolonial Hindia Belanda yang kompleks. Parlement.com mencatat bahwa ia pernah menjadi anggota Volksraad Hindia Belanda pada 1931–1934, kemudian menjabat sebagai pejabat ekonomi di Buitenzorg mulai 1934, dan Direktur Departemen Urusan Ekonomi sejak 1937. ([Parlement](#))

Volksraad, meskipun sering disebut sebagai dewan perwakilan, pada hakikatnya bukan parlemen demokratis. Ia lebih merupakan badan penasihat kolonial dengan kewenangan terbatas. Namun, keterlibatan Van Mook di Volksraad memperlihatkan kedekatannya dengan wacana reformasi kolonial. Ia mengenal tuntutan elite Indonesia, perdebatan otonomi, serta kritik terhadap struktur diskriminatif Hindia Belanda.

Sebagai pejabat ekonomi, Van Mook memahami bahwa Hindia Belanda memiliki arti strategis bagi Belanda. Komoditas seperti minyak, karet, gula, kopi, teh, timah, dan hasil perkebunan menjadi bagian penting dari ekonomi kolonial. Pada masa menjelang Perang Dunia II, Hindia Belanda juga menjadi wilayah strategis dalam konflik Pasifik, terutama karena cadangan minyaknya. Posisi ekonomi ini membuat Belanda sulit menerima kemerdekaan Indonesia setelah 1945. Bagi Belanda, kehilangan Hindia berarti kehilangan sumber ekonomi, status imperial, dan posisi geopolitik.

Van Mook memahami realitas itu. Namun ia juga memahami bahwa dunia pasca-Perang Dunia II tidak lagi sama. Jepang telah menghancurkan mitos

superioritas kolonial Eropa. Nasionalisme Indonesia telah memperoleh momentum. Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin mendorong prinsip penentuan nasib sendiri. Maka, bagi Van Mook, strategi Belanda tidak boleh hanya berupa restorasi kolonial lama. Harus ada bentuk baru: federalisme, otonomi, dan Uni yang tetap mengikat Indonesia kepada Belanda.

4. Perang Dunia II, Pendudukan Jepang, dan Pemerintahan di Pengasingan

Invasi Jepang mengubah seluruh struktur kekuasaan di Asia Tenggara. Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada 1942. Belanda yang selama berabad-abad tampak kuat tiba-tiba runtuh dalam waktu singkat. Van Mook, bersama pejabat lain, keluar dari Hindia dan menjadi bagian dari pemerintahan pengasingan.

National Archives of Australia mencatat bahwa setelah Hindia Belanda jatuh kepada Jepang pada 1942, Belanda berharap dapat kembali menguasai wilayah itu setelah Jepang kalah. Australia kemudian menjadi basis bagi pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA; dari Australia, NICA merencanakan rekonstruksi pascaperang dan pengembalian kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. ([NAA](#))

Dalam konteks inilah Van Mook menjadi tokoh penting. Ia tidak hanya pejabat kolonial, tetapi juga simbol kesinambungan otoritas Belanda atas wilayah yang secara fisik telah hilang dari kendali Belanda. Pemerintahan pengasingan ini menyusun rencana untuk kembali setelah Jepang kalah. Tetapi rencana itu mengandung kelemahan besar: Belanda mengira bahwa setelah Jepang menyerah, kekuasaan kolonial dapat dipulihkan, setidaknya dengan bantuan Sekutu. Mereka meremehkan kedalaman perubahan politik di Indonesia.

Pendudukan Jepang memang brutal, tetapi secara politik juga membuka ruang mobilisasi nasional. Jepang membentuk organisasi massa, melatih pemuda, memberi ruang terbatas kepada pemimpin nasionalis, dan membangun struktur militer lokal seperti PETA. Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini mengubah seluruh kalkulasi Van Mook.

5. Proklamasi 1945 dan Kegagalan Belanda Membaca Realitas Baru

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda menghadapi persoalan mendasar: apakah Republik Indonesia harus dianggap sebagai gerakan kolaborator Jepang yang tidak sah, atau sebagai kekuatan politik nyata yang harus diajak berunding? Pada awalnya, banyak pejabat Belanda melihat Soekarno dan Hatta terutama sebagai kolaborator Jepang. Sikap ini membuat Belanda sulit menerima Republik sebagai mitra sah.

Dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Oktober 1945 menunjukkan bahwa otoritas Belanda sebelum Jepang menyerah sangat optimistis mengenai kemungkinan kembalinya Belanda, tetapi perkembangan setelah proklamasi membuat mereka terguncang.

Dokumen itu juga mencatat bahwa Mountbatten mendorong agar Van der Plas menyampaikan kepada Van Mook dan pemerintah Belanda perlunya pernyataan tentang "some degree of independence" bagi Hindia Belanda. ([Office of the Historian](#))

Sumber yang sama memperlihatkan bahwa Inggris tidak ingin pasukannya terseret terlalu jauh dalam politik internal Hindia Belanda dan hanya ingin menjalankan tugas militer pascaperang: melucuti Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga wilayah kunci. Ini penting karena Belanda tidak segera memiliki kekuatan militer cukup untuk kembali menguasai Jawa dan Sumatra. ([Office of the Historian](#))

Van Mook berada di tengah dilema ini. Ia menyadari bahwa Republik tidak bisa diabaikan. Namun ia juga tidak bersedia menerima Republik sebagai representasi tunggal seluruh Indonesia. Bagi Van Mook, Republik terutama kuat di Jawa dan Sumatra. Daerah luar Jawa, terutama Indonesia Timur dan Kalimantan, menurutnya harus diberi tempat tersendiri dalam struktur federal. Gagasan ini kemudian menjadi inti kebijakan Van Mook.

Dari perspektif Indonesia, gagasan tersebut dipahami sebagai upaya memecah kekuatan Republik. Dari perspektif Van Mook, federalisme dianggap sebagai bentuk realistis bagi kepulauan yang sangat majemuk. Akan tetapi, masalah utamanya bukan hanya bentuk negara federal itu sendiri, melainkan siapa yang merancanginya, dalam situasi kekuasaan seperti apa ia dibentuk, dan untuk kepentingan siapa ia dijalankan.

6. NICA dan Upaya Restorasi Administrasi Belanda

NICA adalah instrumen penting dalam strategi Belanda setelah Jepang kalah. Secara formal, NICA bertugas memulihkan administrasi sipil, ketertiban, dan pelayanan pemerintahan di wilayah bekas Hindia Belanda. Namun bagi kaum Republik, NICA dipandang sebagai alat kembalinya kolonialisme. Kehadiran NICA bersama pasukan Sekutu menimbulkan kecurigaan dan perlawanan luas.

National Archives of Australia mencatat bahwa NICA didirikan sebagai pemerintahan pengasingan di Camp Columbia, Brisbane, dan Van Mook memimpin gerak pemerintahan Hindia Belanda dari basis Australia; NICA merencanakan "recolonisation and post-war reconstruction" atas Hindia Belanda. ([NAA](#))

Kata "recolonisation" dalam sumber arsip Australia sangat penting. Ia memperlihatkan bagaimana proses pascaperang tidak hanya menyangkut pemulihan administrasi, tetapi juga pengembalian struktur kolonial. Dalam pandangan Indonesia, kemerdekaan telah diproklamasikan, sehingga

setiap upaya menghidupkan kembali administrasi Belanda dianggap sebagai agresi terhadap kedaulatan.

Van Mook tampaknya memahami bahwa istilah dan citra NICA menimbulkan resistensi. Namun secara substantif, ia tetap mewakili otoritas Belanda. Tugasnya adalah mencari jalan agar Belanda tidak kehilangan Indonesia sepenuhnya. Dalam praktiknya, ini berarti membangun pemerintahan alternatif di luar Republik, berunding ketika perlu, dan menggunakan kekuatan ketika diplomasi dianggap gagal.

7. Gagasan Federalisme Van Mook

Federalisme adalah inti warisan politik Van Mook. Ia membayangkan Indonesia pascakolonial sebagai negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian, dengan Republik Indonesia sebagai salah satu bagian, bukan sebagai satu-satunya representasi negara Indonesia. Negara federal itu kemudian akan berada dalam hubungan Uni Indonesia–Belanda.

Parlement.com secara ringkas menyebut bahwa setelah 1945 Van Mook menjadi pejabat tertinggi Belanda di Hindia Belanda dan merancang konsep negara federal Indonesia yang menjadi bagian dari Uni Indonesia–Belanda. Ketika gagasan itu tidak dapat dicapai melalui negosiasi, ia kemudian menjadi pendukung tindakan bersenjata. ([Parlement](#))

Gagasan federalisme Van Mook harus dibedakan dari federalisme sebagai konsep politik umum. Secara teoritis, federalisme dapat menjadi bentuk demokratis untuk negara majemuk. Negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, India, dan Swiss menggunakan unsur federal. Dalam negara kepulauan dan multietnis seperti Indonesia, perdebatan federalisme sebenarnya tidak sepenuhnya tidak masuk akal.

Masalahnya, federalisme Van Mook lahir dalam konteks kolonial. Negara-negara bagian dibentuk di wilayah yang berada di bawah pengaruh militer dan administrasi Belanda. Banyak tokoh Republik melihat proses ini bukan

sebagai ekspresi aspirasi daerah yang bebas, melainkan sebagai strategi politik Belanda untuk mengimbangi Republik. Karena itu, istilah “negara boneka” menjadi kuat dalam narasi nasional Indonesia.

Leiden University Libraries menjelaskan bahwa pada Konferensi Malino 1946, Van Mook mengungkapkan rencana dekolonisasi bertahap yang diarahkan pada pembentukan federasi negara-negara sebagai penyeimbang Republik di Jawa dan Sumatra; sumber itu juga mencatat bahwa Soekarno dan para pendukungnya memandang negara-negara Malino sebagai negara boneka Belanda, meskipun sebagian federalis Indonesia menghendaki kemerdekaan bertahap dengan otonomi lokal. (webpresentations.universiteitleiden.nl)

Dari sini terlihat bahwa konflik Van Mook dengan Republik bukan hanya konflik Belanda melawan Indonesia, tetapi juga konflik mengenai bentuk negara: kesatuan atau federal, revolusi cepat atau transisi bertahap, kedaulatan penuh atau kemitraan dalam Uni, Republik sebagai pusat atau Republik sebagai salah satu bagian.

8. Linggadjati: Diplomasi, Kompromi, dan Ambiguitas

Perundingan Linggadjati merupakan salah satu momen terpenting dalam hubungan Van Mook dengan Republik Indonesia. Perjanjian ini dirancang pada November 1946 dan ditandatangani di Batavia pada 25 Maret 1947. Britannica menjelaskan bahwa isi utama Linggadjati adalah pengakuan Belanda terhadap Republik sebagai otoritas de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra, serta kesepakatan untuk bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat yang federal dan Uni Indonesia–Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. ([Encyclopedia Britannica](https://www.britannica.com/topic/linggadjati))

Bagi Van Mook, Linggadjati adalah jalan tengah. Belanda tidak lagi dapat mengabaikan Republik, tetapi Republik juga tidak boleh menjadi negara kesatuan yang langsung menguasai seluruh bekas Hindia Belanda. Dengan mengakui Republik secara de facto di Jawa, Madura, dan Sumatra, Belanda

mengakui realitas politik lapangan. Namun dengan mendorong federalisme, Belanda tetap mempertahankan ruang pengaruh di luar wilayah Republik.

Encyclopedia.com mencatat bahwa Van Mook menganggap perundingan dengan Republik tidak terhindarkan, tetapi ia ingin pengakuan de facto atas Republik ditukar dengan penerimaan Indonesia terhadap negara federal yang menjadi mitra Kerajaan Belanda. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa rancangan kompromi Van Mook menempatkan Republik, Indonesia Timur, dan Borneo sebagai komponen Negara Indonesia Serikat. ([Encyclopedia](#))

Namun Linggadjati mengandung ambiguitas besar. Belanda dan Republik menafsirkan perjanjian ini secara berbeda. Britannica mencatat bahwa tiap pihak menafsirkan Linggadjati sesuai kepentingannya dan akhirnya konflik terbuka berkembang antara Belanda dan Republik. ([Encyclopedia Britannica](#))

Di pihak Republik, Linggadjati dilihat sebagai langkah diplomatik menuju pengakuan kedaulatan penuh. Di pihak Belanda, Linggadjati dilihat sebagai dasar pembentukan struktur federal yang tetap mempertahankan hubungan kuat dengan Belanda. Perbedaan tafsir ini menjadi sumber konflik berikutnya.

9. Malino, Denpasar, dan Pembentukan Negara Indonesia Timur

Konferensi Malino pada Juli 1946 adalah salah satu langkah paling nyata Van Mook dalam membangun alternatif terhadap Republik. Konferensi ini mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia Timur dan Kalimantan. Tujuannya adalah merancang masa depan politik daerah-daerah luar Republik dalam bentuk federal.

Leiden University Libraries menempatkan Malino sebagai awal konflik pahit mengenai bentuk konstitusional dan arah politik Indonesia. Dari perspektif

Belanda, Malino merupakan wadah untuk menampilkan aspirasi daerah dan minoritas yang tidak ingin didominasi Republik Jawa-Sumatra. Dari perspektif Republik, Malino adalah instrumen kolonial untuk melemahkan Republik. (webpresentations.universiteitleiden.nl)

Setelah Malino, Belanda melanjutkan proses ke Konferensi Denpasar pada Desember 1946 yang menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Timur. Negara ini mencakup wilayah yang luas: Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan bagian timur lainnya. Dalam kerangka Van Mook, Negara Indonesia Timur menjadi salah satu pilar federalisme.

Akan tetapi, legitimasi negara federal ini terus diperdebatkan. Sebagian tokoh daerah memang menginginkan otonomi lebih besar dan tidak ingin seluruh Indonesia didominasi pusat di Jawa. Namun situasi politik saat itu tidak sepenuhnya bebas. Belanda memiliki kontrol militer dan administratif atas banyak wilayah tersebut. Karena itu, sulit memisahkan aspirasi lokal dari rekayasa kolonial.

Dalam sejarah Indonesia, pengalaman ini membuat federalisme menjadi istilah yang lama dicurigai. Setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk pada 1949, bentuk federal hanya bertahan singkat. Pada 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warisan ini menunjukkan betapa kuatnya asosiasi antara federalisme dan politik Belanda dalam ingatan nasional Indonesia.

10. Van Mook dan Agresi Militer Belanda I

Ketika tafsir Linggadjati tidak dapat disatukan, ketegangan meningkat. Belanda menuduh Republik tidak menjalankan kewajiban perjanjian. Republik menuduh Belanda mengingkari semangat pengakuan kedaulatan. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang disebut "politioele actie" atau aksi polisionil, sedangkan Indonesia menyebutnya Agresi Militer Belanda I.

Istilah “aksi polisionil” menunjukkan cara Belanda membingkai konflik: bukan perang antara dua negara, melainkan operasi ketertiban dalam wilayah yang masih diklaim sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Sebaliknya, bagi Republik, ini adalah agresi terhadap negara yang telah merdeka. Perbedaan istilah ini mencerminkan perbedaan legitimasi.

Parlement.com menyatakan bahwa Van Mook, yang semula merancang negara federal dalam Uni Indonesia–Belanda, akhirnya menjadi pendukung tindakan bersenjata ketika tujuan itu tidak tercapai melalui negosiasi.

([Parlement](#))

Peran Van Mook dalam Agresi Militer Belanda I menunjukkan batas liberalisme kolonialnya. Ia dapat menerima perubahan, tetapi dalam batas yang ditentukan Belanda. Ketika Republik menolak batas itu, ia mendukung penggunaan kekuatan. Di sinilah reputasinya di Indonesia menjadi sangat negatif.

Agresi Militer Belanda I berhasil secara militer dalam arti Belanda menguasai wilayah ekonomi penting, tetapi gagal secara politik. Dunia internasional mulai melihat konflik Indonesia bukan sekadar urusan internal Belanda. Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat. Amerika Serikat semakin menekan Belanda. Konflik Indonesia menjadi bagian dari dinamika dekolonisasi global.

11. Renville dan Garis Van Mook

Setelah Agresi Militer Belanda I, muncul Perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini dimediasi oleh Komisi Tiga Negara dan dilaksanakan di kapal USS Renville. Salah satu akibat pentingnya adalah munculnya garis demarkasi yang dikenal sebagai **Garis Van Mook**.

Sumber University of North Carolina mengenai pernyataan Frank Porter Graham mencatat bahwa Garis Van Mook pada dasarnya didasarkan pada

garis yang ditarik pada 29 Agustus 1947 antara titik-titik terdepan posisi Belanda. ([Carolina Asia Center](#))

Garis ini sangat merugikan Republik karena membatasi wilayah Republik dan memotong hubungan dengan sejumlah wilayah strategis. Bagi Belanda, garis ini merupakan hasil posisi militer pasca-agresi. Bagi Republik, garis itu mempersempit ruang kedaulatan dan menempatkan Republik dalam posisi defensif.

Renville sering dianggap sebagai kemenangan taktis Belanda tetapi bukan kemenangan strategis. Republik terpaksa menerima keadaan yang berat, tetapi Belanda semakin kehilangan simpati internasional. Garis Van Mook menjadi simbol batas paksa yang lahir dari superioritas militer, bukan dari kesepakatan politik yang setara.

12. Hubungan Van Mook dengan Pemerintah Belanda

Van Mook sering dipersepsikan sebagai representasi tunggal kebijakan Belanda. Namun hubungan Van Mook dengan pemerintah di Den Haag tidak selalu harmonis. Ia sering dianggap terlalu liberal oleh kelompok konservatif Belanda, tetapi terlalu kolonial oleh Republik Indonesia. Posisi ini membuatnya berada di tengah tekanan dari berbagai arah.

Parlement.com mencatat bahwa Van Mook akhirnya mengundurkan diri pada 1948 karena ketidakpuasan terhadap politik Indonesia kabinet-kabinet pascaperang Belanda. Setelah itu ia menjadi profesor di Amerika Serikat. ([Parlement](#))

Pengunduran dirinya menunjukkan bahwa proyek Van Mook tidak sepenuhnya diterima oleh Den Haag. Sebagian politisi Belanda ingin pendekatan lebih keras; sebagian lain dipaksa oleh tekanan internasional untuk menerima penyelesaian. Van Mook, yang merasa memahami Indonesia lebih baik daripada politisi di Belanda, frustrasi karena ruang manuvernya menyempit.

Namun, dari sudut Indonesia, perbedaan antara Van Mook dan pemerintah Belanda tidak banyak mengubah fakta bahwa keduanya tetap menolak kedaulatan penuh Republik pada fase awal. Karena itu, meskipun Van Mook dapat disebut lebih moderat dibanding kolonialis keras, ia tetap menjadi lawan politik utama Republik.

13. Ambivalensi Pribadi dan Dilema Moral Van Mook

Salah satu aspek menarik dari Van Mook adalah ambivalensi pribadinya. Ia lahir di Hindia, mengenal masyarakat lokal, berbicara tentang "Indonesia yang bebas dan bahagia" dalam sejumlah narasi biografis Belanda, dan percaya bahwa kolonialisme lama harus berubah. Namun ia juga mendukung tindakan militer dan mempertahankan kerangka kedaulatan Belanda.

Ambivalensi ini bukan hanya persoalan pribadi. Ia mencerminkan ambivalensi kolonialisme liberal. Kolonialisme liberal mengakui bahwa masyarakat jajahan harus berkembang, tetapi tetap menganggap kekuasaan kolonial sebagai pembimbing yang sah. Ia berbicara tentang pendidikan dan kemajuan, tetapi tidak sepenuhnya menerima kesetaraan politik.

Van Mook ingin Indonesia merdeka secara bertahap, tetapi di bawah arsitektur yang dirancang Belanda. Republik menghendaki kemerdekaan sebagai hak, bukan hadiah. Di sinilah konflik moral dan politik terjadi. Bagi Van Mook, Republik terlalu cepat, terlalu Jawa-sentris, terlalu dipengaruhi Jepang, dan terlalu berisiko bagi stabilitas. Bagi Republik, Van Mook adalah simbol kekuasaan asing yang tidak rela melepaskan penjajahan.

14. Van Mook dalam Konteks Kekerasan Dekolonisasi

Periode 1945–1950 bukan hanya periode diplomasi, tetapi juga periode kekerasan. Terdapat kekerasan revolusioner, konflik sosial, perang gerilya,

represi militer, dan tindakan ekstrem oleh berbagai pihak. Dalam historiografi Belanda kontemporer, kekerasan militer Belanda mendapat perhatian besar.

NIOD mencatat bahwa program riset bersama KITLV, NIMH, dan NIOD mengenai kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia 1945–1950 menyimpulkan bahwa pemerintah dan pimpinan militer Belanda secara sengaja membiarkan penggunaan kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas oleh angkatan bersenjata Belanda dalam perang melawan Republik Indonesia. (niod.nl)

Pernyataan ini penting untuk menilai Van Mook secara historis. Tidak tepat menyederhanakan seluruh kekerasan sebagai keputusan pribadi Van Mook. Namun sebagai pejabat tertinggi Belanda di Hindia Belanda pada masa kritis, ia menjadi bagian dari struktur politik yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi. Tanggung jawab historisnya bukan hanya pada kebijakan yang ia tulis, tetapi juga pada sistem yang ia pimpin.

Dalam konteks inilah Van Mook tidak dapat dipisahkan dari kekerasan dekolonisasi. Ia mungkin bukan perwira lapangan, tetapi kebijakan politiknya membuka jalan bagi operasi militer. Ia mungkin menyukai negosiasi, tetapi menerima perang sebagai alat politik ketika negosiasi gagal. Ia mungkin menghendaki transisi, tetapi transisi yang dikendalikannya tetap berada dalam bayang-bayang kekuatan kolonial.

15. Penilaian Historiografis: Antara Reformis dan Kolonialis

Historiografi tentang Van Mook umumnya terbagi dalam beberapa kecenderungan. Pertama, historiografi nasional Indonesia melihatnya sebagai arsitek federalisme kolonial dan tokoh penting dalam upaya Belanda melemahkan Republik. Dalam perspektif ini, Van Mook adalah lawan kemerdekaan Indonesia.

Kedua, sebagian historiografi Belanda melihat Van Mook sebagai administrator reformis yang berusaha mencari jalan tengah antara kolonialisme lama dan kemerdekaan. Ia dianggap memahami bahwa Hindia Belanda tidak bisa kembali seperti sebelum 1942. Namun ia dikalahkan oleh konservatisme Belanda, radikalisme Republik, dan dinamika internasional.

Ketiga, historiografi kontemporer yang lebih kritis melihat Van Mook sebagai figur ambivalen. Ia memang lebih realistis daripada kolonialis reaksioner, tetapi tetap berpikir dalam kerangka superioritas Belanda. Ia mengakui perlunya kemerdekaan bertahap, tetapi tidak menerima kedaulatan Republik sebagai dasar negosiasi yang setara.

Pendekatan ketiga tampaknya paling seimbang. Van Mook bukan sekadar "penjajah jahat" dalam pengertian karikatural. Ia seorang administrator cerdas, berpendidikan, dan memahami perubahan zaman. Tetapi kecerdasannya justru digunakan untuk merancang format pascakolonial yang tetap mempertahankan pengaruh Belanda. Karena itu, kritik Indonesia terhadapnya tetap sah secara historis.

16. Federalisme Van Mook dan Trauma Negara Kesatuan

Salah satu warisan terbesar Van Mook adalah trauma politik Indonesia terhadap federalisme. Setelah 1949, Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai hasil Konferensi Meja Bundar. Namun bentuk RIS segera runtuh dan digantikan oleh NKRI pada 1950. Pengalaman negara-negara bagian bentukan Belanda membuat federalisme dipandang sebagai proyek kolonial.

Padahal, secara teoretis, federalisme tidak selalu kolonial. Namun dalam sejarah Indonesia, federalisme pernah hadir melalui intervensi Belanda. Itulah sebabnya wacana federalisme setelah 1950 sering dicurigai sebagai ancaman terhadap persatuan nasional.

Van Mook berperan besar dalam pembentukan asosiasi negatif itu. Dengan membangun negara-negara bagian dalam wilayah yang berada di bawah pengaruh Belanda, ia membuat federalisme kehilangan legitimasi nasional. Akibatnya, pilihan negara kesatuan memperoleh kekuatan moral dan politik yang sangat besar.

Dari sudut manajemen negara, pelajaran ini menarik. Sebuah desain institusi tidak hanya dinilai dari logika formalnya, tetapi juga dari sejarah kelahirannya. Federalisme bisa baik dalam satu konteks, tetapi menjadi tidak legitimate dalam konteks lain jika ia lahir dari kekuasaan asing. Van Mook gagal memahami bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun dari rancangan konstitusional; ia harus tumbuh dari kehendak rakyat yang bebas.

17. Van Mook dan Republik Indonesia

Hubungan Van Mook dengan para pemimpin Republik penuh kecurigaan. Ia tidak percaya sepenuhnya kepada Soekarno karena riwayat kerja sama Soekarno dengan Jepang. Ia lebih cenderung mencari tokoh moderat seperti Sutan Sjahrir yang dianggap dapat diajak berunding. Namun pada akhirnya, Republik tidak bisa dipisahkan dari Soekarno-Hatta dan dukungan rakyat.

Van Mook tampaknya berharap dapat memanfaatkan perbedaan antara kelompok moderat dan radikal di Indonesia. Ia mengira bahwa dengan menawarkan federalisme dan hubungan Uni, kelompok moderat akan bersedia menerima kompromi. Namun ia meremehkan kekuatan nasionalisme Indonesia. Bahkan tokoh moderat pun menghendaki kemerdekaan penuh, bukan otonomi dalam bayang-bayang Belanda.

Encyclopedia.com mencatat bahwa Belanda gagal memahami bahwa "moderate Indonesians" juga menginginkan kemerdekaan penuh. Sumber tersebut menjelaskan bahwa setelah perbedaan tafsir Linggadjati tidak dapat dijembatani, Belanda memilih perang pada 1947 dengan harapan

kelompok moderat akan mengambil alih kekuasaan Republik, tetapi kalkulasi itu keliru. ([Encyclopedia](#))

Kesalahan ini sangat penting. Van Mook memahami pluralitas Indonesia, tetapi kurang memahami bahwa anti-kolonialisme telah menjadi bahasa politik lintas kelompok. Ia benar bahwa Indonesia majemuk. Namun ia keliru jika menganggap kemajemukan itu dapat dipakai untuk menunda kedaulatan nasional.

18. Akhir Karier dan Kehidupan Setelah Indonesia

Setelah mengundurkan diri pada 1948, Van Mook tidak lagi menjadi pusat kebijakan Belanda di Indonesia. Peran Belanda kemudian diambil alih oleh pejabat lain dalam fase akhir menuju Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan pada 1949. Van Mook kemudian berkarier di luar Belanda dan Indonesia, termasuk dalam dunia akademik serta organisasi internasional.

Pengunduran diri Van Mook dapat dibaca sebagai kegagalan proyek pribadinya. Ia gagal mempertahankan Indonesia dalam bentuk federal yang terikat erat pada Belanda. Ia juga gagal memperoleh dukungan penuh dari Den Haag. Di sisi lain, Republik tetap bertahan meskipun ditekan secara militer dan diplomatik.

Van Mook wafat di L'Isle-sur-la-Sorgue, Prancis, pada 10 Mei 1965. Nama dan warisannya tetap hidup dalam sejarah Indonesia, terutama melalui istilah Garis Van Mook dan proyek federalisme. Namun ia tidak dikenang sebagai tokoh rekonsiliasi, melainkan sebagai tokoh transisi kolonial yang gagal memahami arah sejarah.

19. Makna Van Mook bagi Studi Manajemen dan Kepemimpinan Politik

Riwayat Van Mook tidak hanya penting bagi sejarah politik, tetapi juga bagi studi manajemen publik dan kepemimpinan strategis. Ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin birokratis dapat memiliki kecerdasan teknokratik tetapi gagal membaca legitimasi sosial.

Ada beberapa pelajaran manajerial dari Van Mook. Pertama, perubahan tidak dapat dikelola hanya dari atas. Van Mook ingin merancang masa depan Indonesia melalui konferensi, komisi, dan struktur federal. Namun masa depan politik tidak dapat didesain sepihak oleh kekuasaan kolonial.

Kedua, legitimasi lebih penting daripada desain administratif. Negara federal Van Mook mungkin tampak rasional secara administratif, tetapi tidak legitimate karena lahir dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda.

Ketiga, kebijakan transisi membutuhkan pengakuan terhadap realitas baru. Van Mook memahami bahwa kolonialisme lama berakhir, tetapi tidak sepenuhnya menerima Republik sebagai realitas baru. Ia mencoba jalan tengah yang justru ditolak kedua pihak.

Keempat, penggunaan kekuatan dapat menghasilkan kemenangan taktis tetapi kekalahan strategis. Agresi militer Belanda memperluas wilayah kekuasaan Belanda sementara, tetapi memperkuat simpati internasional terhadap Republik dan mempercepat internasionalisasi konflik.

Kelima, pemimpin yang berada di antara dua zaman harus mampu melepaskan paradigma lama. Van Mook hidup di antara kolonialisme dan dekolonisasi. Ia memahami datangnya zaman baru, tetapi masih membawa asumsi lama bahwa Belanda berhak mengatur masa depan Indonesia.

20. Kesimpulan

Hubertus Johannes van Mook adalah tokoh kunci dalam sejarah akhir Hindia Belanda dan awal Indonesia merdeka. Ia lahir di Semarang, dididik dalam tradisi administrasi kolonial, menjadi pejabat ekonomi, menteri, dan Letnan Gubernur Jenderal. Setelah Jepang kalah dan Republik Indonesia

diproklamasikan, ia menjadi arsitek utama strategi Belanda untuk mempertahankan pengaruh melalui NICA, diplomasi, federalisme, dan tindakan militer.

Van Mook bukan tokoh yang mudah dikategorikan. Ia bukan kolonialis konservatif murni yang ingin mengembalikan Hindia Belanda persis seperti sebelum 1942. Ia menyadari bahwa perubahan tidak dapat dihindari. Namun ia juga bukan tokoh dekolonisasi yang menerima kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Ia ingin Indonesia berubah, tetapi tetap dalam desain Belanda. Ia menerima kemerdekaan bertahap, tetapi bukan kemerdekaan sebagai hak yang telah diproklamasikan rakyat Indonesia.

Perannya dalam Linggadjati menunjukkan kemampuan kompromi, tetapi juga ambiguitas. Perannya dalam Malino dan pembentukan negara federal menunjukkan kecerdikan konstitusional, tetapi juga strategi melemahkan Republik. Perannya dalam Agresi Militer Belanda I menunjukkan bahwa reformisme kolonialnya memiliki batas. Perannya dalam Renville dan Garis Van Mook memperlihatkan bagaimana kekuatan militer dipakai untuk membentuk peta politik.

Dalam sejarah Indonesia, Van Mook dikenang terutama sebagai arsitek federalisme kolonial dan simbol usaha Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dalam bentuk baru. Dalam sejarah Belanda, ia kadang dikenang sebagai reformis yang gagal. Penilaian yang lebih seimbang melihatnya sebagai figur ambivalen: seorang administrator cerdas yang memahami bahwa kolonialisme lama telah mati, tetapi gagal menerima bahwa Republik Indonesia telah lahir sebagai kekuatan politik yang sah.

Warisan Van Mook mengajarkan bahwa transisi sejarah tidak dapat dikendalikan oleh rancangan teknokratik semata. Kedaulatan tidak dapat diganti dengan kompromi administratif jika rakyat telah menuntut kemerdekaan. Dalam hal ini, Van Mook adalah contoh tragis seorang pemimpin kolonial yang melihat sebagian masa depan, tetapi tetap terikat pada masa lalu.

Glossarium

Agresi Militer Belanda I

Operasi militer Belanda terhadap Republik Indonesia pada Juli 1947. Belanda menyebutnya *politioenele actie*, sedangkan Indonesia menyebutnya agresi.

AMACAB

Allied Military Administration–Civil Affairs Branch, nama pengganti NICA dalam konteks administrasi sipil Sekutu-Belanda.

Dekolonisasi

Proses berakhirnya kekuasaan kolonial dan lahirnya negara merdeka.

Federalisme

Sistem negara yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau daerah otonom.

Garis Van Mook

Garis demarkasi setelah Agresi Militer Belanda I yang menghubungkan posisi terdepan Belanda dan menjadi dasar wilayah dalam Perjanjian Renville.

Hindia Belanda

Nama kolonial bagi wilayah yang kemudian menjadi Indonesia, berada di bawah kekuasaan Belanda hingga pendudukan Jepang dan Revolusi Nasional Indonesia.

Konferensi Malino

Konferensi tahun 1946 di Sulawesi Selatan yang diprakarsai Belanda untuk membahas bentuk federal bagi Indonesia, terutama wilayah luar Republik.

Linggadjati

Perjanjian antara Belanda dan Republik Indonesia yang mengakui Republik secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra serta merancang Negara Indonesia Serikat.

NICA

Netherlands Indies Civil Administration, badan administrasi sipil Belanda yang dirancang untuk memulihkan pemerintahan Belanda setelah Jepang kalah.

Politik Etis

Kebijakan kolonial Belanda awal abad ke-20 yang mengklaim kewajiban moral Belanda untuk memajukan pendidikan, irigasi, dan migrasi penduduk pribumi.

Republik Indonesia Serikat

Bentuk negara federal Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar 1949, yang kemudian dibubarkan dan diganti NKRI pada 1950.

Renville

Perjanjian 1948 antara Republik Indonesia dan Belanda yang dimediasi Komisi Tiga Negara dan menghasilkan pengaturan garis demarkasi.

Uni Indonesia–Belanda

Rancangan hubungan politik antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan, yang dikehendaki Belanda agar tetap mempertahankan ikatan politik dan ekonomi.

Volksraad

Dewan penasihat Hindia Belanda yang memiliki unsur perwakilan tetapi kewenangannya terbatas dan tidak setara dengan parlemen demokratis.

Daftar Pustaka

Referensi Akademik Utama

Cheong, Y. M. (1982). *H. J. van Mook and Indonesian independence: A study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945–48*. Martinus Nijhoff.

Cribb, R. (1986). A revolution delayed: The Indonesian Republic and the Netherlands Indies, August–November 1945. *Australian Journal of Politics & History*, 32(1), 72–85. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.1986.tb00342.x>

Foray, J. L. (2013). The Dutch Commonwealth schemes of the 1920s–40s. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 41(2), 295–315. <https://doi.org/10.1080/03086534.2013.768095>

Homan, G. D. (1990). The Netherlands, the United States and the Indonesian question, 1948. *Journal of Contemporary History*, 25(1), 123–141. <https://doi.org/10.1177/002200949002500106>

Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.

Reid, A. (1974). *The Indonesian national revolution, 1945–1950*. Longman.

Schiller, A. A. (1955). *The formation of federal Indonesia, 1945–1949*. W. van Hoeve.

Van Niel, R. (1984). H. J. van Mook and Indonesian independence: A study of his role in Dutch-Indonesian relations 1945–48. *Journal of Southeast Asian Studies*, 15(2), 421–423. <https://doi.org/10.1017/S0022463400012674>

Wolf, C., Jr. (1956). The formation of federal Indonesia 1945–1949. *The Journal of Asian Studies*, 15(3), 504–506. <https://doi.org/10.2307/2942125>

Referensi Ensiklopedia, Arsip, dan Sumber Digital Akademik

Britannica. (n.d.). *Linggadjati Agreement*. Encyclopaedia Britannica.

Encyclopedia.com. (n.d.). *Linggadjati Agreement*. *Encyclopedia of Western Colonialism since 1450*.

Leiden University Libraries. (2022). *A colonial future? Images of the Indonesian War of Independence, 1945–1949*.

National Archives of Australia. (2026). *A government in exile*.

NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. (2022). *Independence, decolonization, violence and war in Indonesia, 1945–1950*.

Parlement.com. (n.d.). *Dr. H. J. (Huib) van Mook*.

U.S. Department of State, Office of the Historian. (1945). *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Volume VI: Memorandum by the Chief of the Division of Northern European Affairs*.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4)). <https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4>